

MEREBUT RUANG IBADAH: STUDI KASUS KONFLIK PENUTUPAN PAKSA PONDOK PESANTREN WARIA AL-FATAH YOGYAKARTA

Masthuriyah Sa'dan

masthuriyah.sadan@gmail.com

Asosiate peneliti Rumah KitaB

Abstract: The concept of transgender Islamic boarding schools is different from the general concept of Islamic boarding schools. in Yogyakarta, there is a transgender Muslim community that gathers in one forum, namely the Al-Fattah Yogyakarta transgender Islamic boarding school. Every weekend, the transgender Muslim community gathers and holds religious activities. Due to the unique existence of transgender Islamic boarding schools, these pesantren often have regional, national and international guests for various purposes. Starting from surveys, research, collaborative program activities, sharing experiences to transgender empowerment. Transgender Islamic boarding schools also have complexities that are a source of conflict. Conflict is something natural (*natural*) and is a very typical phenomenon in the type of human relations at every level, from the interpersonal to the global level. The cause of the emergence of conflict is that there are threatened interests and values so that conflicting needs are not fulfilled. It is at this level of conflict that a solution is needed, scientists offer a way of conflict resolution as a peaceful way that satisfies the two warring parties to end the conflict.

Keywords: Religious Activities; Human Relations; Transgender Islamic Boarding Schools.

Abstrak: Konsep pondok pesantren waria berbeda dengan konsep pondok pesantren pada umumnya. di Yogyakarta, terdapat komunitas muslim waria yang berkumpul dalam satu wadah yaitu pondok pesantren waria Al-Fattah Yogyakarta. Setiap akhir pekan, komunitas muslim waria berkumpul dan mengadakan kegiatan keagamaan. Karena eksistensi pondok pesantren waria yang unik, pesantren ini seringkali kehadiran tamu baik regional, nasional hingga internasional untuk beragam tujuan. Mulai untuk survei, penelitian, kerjasama kegiatan program, sharing pengalaman hingga pemberdayaan waria. Pondok pesantren waria juga memiliki kompleksitas yang menjadi sumber konflik. Konflik merupakan sesuatu yang alami (*natural*) dan merupakan fenomena yang sangat tipikal dalam jenis hubungan antar manusia pada setiap tingkatan, dari tingkat inter-personal sampai global. Penyebab dari munculnya konflik adalah adanya kepentingan dan nilai-nilai yang terancam sehingga kebutuhan yang berkonflik tidak terpenuhi. Pada tataran konflik inilah jalan penyelesaian dibutuhkan, ilmuwan menawarkan jalan resolusi konflik sebagai suatu cara damai yang memuaskan kedua pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik.

Kata Kunci: Aktivitas Keagamaan; Hubungan Manusia; Pesantren Waria.

Pendahuluan

Di kota Yogyakarta, waria tidak menjadi suatu kelompok sosial yang sangat sulit untuk ditemukan. Hampir di salon-salon kecantikan, lampu merah, sepanjang jalan Tugu-Malioboro dan pasar bisa menemukan tempat "mangkal"-nya para waria. Tetapi di Yogyakarta, terdapat komunitas muslim waria yang berkumpul dalam satu wadah yaitu pondok pesantren waria Al-Fattah Yogyakarta. Setiap akhir pekan, komunitas muslim waria berkumpul dan mengadakan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dipimpin oleh seorang ustad dan santri para waria belajar Islam di dalamnya.¹

Konsep pondok pesantren waria berbeda dengan konsep pondok pesantren pada umumnya. Jika Zamakhsyari Dhofier mengatakan bahwa kata "pesantren" berasal dari kata "santri" dengan awalan "pe" dan akhiran "-an", maka pesantren secara harfiah memiliki makna bahwa tempat untuk santri. Sedangkan pondok-berasal dari kata bahasa arab "*funduk*" yang bermakna asrama, maka pondok bermakna asrama dari bambu tempat para santri tinggal.²

Pondok pesantren adalah sebuah tempat tinggal untuk para santri yang sedang menempuh pendidikan agama Islam. Catatan sejarah Nusantara mengatakan bahwa pusat pendidikan Islam mulanya adalah langgar atau masjid, atau rumah sang guru, dimana murid duduk di lantai, menghadap sang guru dan belajar mengaji di waktu malam hari. Hal yang demikian menjadi embrio lahirnya sistem pendidikan pondok pesantren.³ Tujuan dari pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat menyeluruh yang berhubungan dengan Tuhan, manusia dan alam. Selain itu produk pesantren ini diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan responsi terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada.⁴

Secara umum tujuan pendidikan pesantren adalah untuk menjaga moral, melatih semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, menjaga sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, menyiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati, kemudian untuk menanamkan pandangan belajar bahwa belajar bukan untuk

¹ Dian Maya Safitri, *Menengok Indahnya Islamicate Indonesia Dari Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis Yogyakarta*, Prosiding Makalah AICIS 2011 di Bangka Belitung.

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Yogyakarta: LP3ES, 1985. hlm. 23.

³ Zuhairini, 1997, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta. hlm. 87.

⁴ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta:Paramadina, 1997.

mengejar uang dan kekuasaan melainkan untuk kewajiban pengabdian kepada Allah.⁵ Tujuan pendidikan di pondok pesantren waria sangat sederhana yaitu mengakomodir komunitas muslim waria Yogyakarta belajar Islam.⁶

Pondok pesantren merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah keislaman Indonesia, bahkan pondok pesantren menjadi suatu ciri khas Islam Indonesia. Karenanya berdasarkan catatan 2019 di kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terdapat 28.194 jumlah pondok pesantren yang tersebar di Indonesia.⁷ Tetapi dari keseluruhan jumlah total pesantren tersebut hanya diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak kepada kelompok waria. Oleh karena itu, keberadaan pondok pesantren waria Al-Fattah di Yogyakarta menjadi satu-satunya untuk tidak mengatakan hanya ada satu di dunia pondok pesantren yang khusus untuk waria.

Karena eksistensi pondok pesantren waria yang unik, pesantren ini seringkali kehadiran tamu baik regional, nasional hingga internasional untuk beragam tujuan. Mulai untuk survei, penelitian, kerjasama kegiatan program, sharing pengalaman hingga pemberdayaan waria. Pesantren waria kemudian mengalami estafet kepemimpinan karena Mariani pendiri pondok pesantren waria meninggal dunia dan digantikan oleh Sinta Ratri.

Pondok pesantren waria juga memiliki kompleksitas yang menjadi sumber konflik. Konflik merupakan sesuatu yang alami (*natural*) dan merupakan fenomena yang sangat tipikal dalam jenis hubungan antar manusia pada setiap tingkatan, dari tingkat interpersonal sampai global. Penyebab dari munculnya konflik adalah adanya kepentingan dan nilai-nilai yang terancam sehingga kebutuhan yang berkonflik tidak terpenuhi.⁸ Pada tataran konflik inilah jalan penyelesaian dibutuhkan, ilmuwan menawarkan jalan resolusi konflik sebagai suatu cara damai yang memuaskan kedua pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik.

Pada 2016, pondok pesantren waria Al-Fattah mengalami konflik yaitu digerebek dan disegel untuk ditutup secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Front Jihad Islam (FJI) karena alasan kegiatan di pesantren waria melanggar syariat Islam.⁹ Setelah dilakukan mediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pejabat

⁵ *Ibid.*, hlm. 21

⁶ Lihat Okky Madasari (edit.), *Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria*, Jakarta: Rehal Pustaka, 2014. hlm. 79-83.

⁷ Lihat website Kemenag RI di <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/>

⁸ Lihat Ahmad Nur Fuad, *Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik*, dalam "Resolusi Konflik Islam Indonesia", Yogyakarta: LKiS, 2007. hlm. 44

⁹ Lihat di <https://nasional.tempo.co/read/751799/penutupan-pesantren-waria-dinilai-melanggar-hak-beragama/full&view=ok>

kecamatan, aparat desa, pihak kepolisian, ketua RT/RW dan perwakilan masyarakat akhirnya pondok pesantren waria kembali beraktifitas dalam senyap.

Telah banyak penelitian yang dilakukan di pondok pesantren waria, akan tetapi penelitian yang fokus kepada resolusi konflik dan menciptakan strategi perdamaian di pondok pesantren waria sejauh ini belum ditemukan. Oleh karena itu kehadiran penelitian ini penting untuk dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana pondok pesantren waria menangani konflik, (2) strategi apa yang digunakan oleh pesantren untuk menciptakan perdamaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan resolusi konflik yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren sekaligus untuk menemukan strategi pondok pesantren dalam membangun perdamaian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *in-depth interview*, kajian literatur dan observasi partisipan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pengasuh, pengurus dan santri pondok pesantren waria.

Pembahasan

A. Sejarah Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta

Pondok pesantren waria Al-Fattah berdiri pada tahun 2008 bulan Juli dan berlokasi di kampung Notoyudan GT II/1294 RW 24 RT 85 Kelurahan Pringgokusuman kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Berdasarkan sejarahnya, ide didirikannya pesantren waria adalah ketika almarhum Mariani mengikuti pengajian majelis mujahadah di pondok pesantren Al-Fattah Bantul Yogyakarta yang dipimpin oleh KH. Hamrolie Harun. Pengajian KH. Hamrolie dihadiri oleh kurang lebih 3.000 jemaah, dan Mariani hanya satu-satunya jemaah pengajian yang menjadi waria. Setelah dua tahun mengikuti kegiatan pengajian sejak tahun 2006, Mariani meminta izin kepada KH. Hamrolie untuk mendirikan pesantren senin-kamis.¹⁰

Permintaan izin Mariani kepada KH. Hamrolie karena sebuah kejadian besar yaitu pada tahun 2007 terjadi gempa bumi besar di Yogyakarta yang mana banyak para waria yang meninggal dunia. Mariani bersama teman-temannya sesama waria mengadakan inisiatif membacakan doa untuk para waria baik muslim maupun non muslim yang telah pergi mendahului. Mariani beserta kawan-kawannya kemudian merasa bahwa pengajian KH.

¹⁰ Untuk sejarah pondok pesantren waria penulis kutip dari tulisan Okky Madasari (edit.), *Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria*, Jakarta: Rehal Pustaka, 2014. hlm. 79-83.

Hamrolie tidak cukup untuk menjawab kebutuhan spiritual para waria. Akhirnya para waria mendiskusikan didirikannya sebuah pondok pesantren khusus waria.¹¹

Mariani ingin untuk berterimakasih atas kebaikan KH. Hamrolie, sehingga Mariani memberi nama pondok pesantren waria senin-kamis dengan nama Al-Fattah, yaitu nama yang sama dengan pengajian sang kyai dengan Mariani sebagai pimpinannya.¹² Tujuan didirikannya pesantren waria senin-kamis menurut Mariani adalah karena Mariani melihat bahwa para waria kering spiritualitas dan membutuhkan pengetahuan agama untuk bekal hidup yang lebih baik.

Keringnya spiritualitas bagi waria disebabkan karena masyarakat berpandangan bahwa waria adalah seorang Pekerja Seks Komersial (PSK), pengamen atau kerja di salon-salon kecantikan. Apalagi menurut hasil penelitian Koeswinarno terhadap komunitas waria di dua kota di pulau Jawa mengatakan bahwa kelompok waria sangat rentan memiliki penyakit menular seksual seperti HIV AIDS karena kehidupan seksual waria yang sangat identik dengan pelacuran.¹³

Dunia pelacuran menjadi transaksi seksual bagi komunitas waria. Meski pandangan tersebut tidak menyeluruh, tetapi pelacuran menjadi satu-satunya mata pencaharian waria yang membuat waria bisa hidup dan eksis. Karenanya Mariani menggunakan pendekatan personal agar para waria memiliki bekal hidup spiritual. Awal mula berdiri, para santri waria yang hadir berjumlah 25 orang, padahal waktu itu jumlah Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) berjumlah 120 orang waria dengan latar belakang daerah yang beragam mulai dari Medan, Padang, Mataram, Surabaya, Tasikmalaya dan Yogyakarta, dan keseluruhan dari mereka bertempat tinggal (ngekos) di Yogyakarta.

Kegiatan pesantren waria senin-kamis dilakukan selama seminggu sekali, yaitu pada hari minggu malam dan hari kamis malam, sejak pukul 17.00 WIB hingga pagi hari. Kegiatan pesantren senin-kamis diisi dengan membaca sholawat, membaca al-Qur'an dan melantunkan doa bersama-sama. Kegiatan juga diselingi dengan sholat berjama'ah, sholat sunnah dan ceramah agama hingga masuk pada waktu subuh. Kemudian para pembimbing atau guru di pesantren waria diundang langsung oleh Mariani. Mulanya para waria dibimbing langsung oleh KH. Hamrolie, kemudian oleh ustadz Murtedja, ustadz Mu'iz dan ustadz Maulidi.

¹¹ Dian Maya Safitri, *Menengok Indahnya Islamate Indonesia Dari Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis Yogyakarta*, Prosiding Makalah AICIS 2011 di Bangka Belitung, hlm. 188.

¹² *Ibid.*, hlm. 189.

¹³ Koeswinarno, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, Yogyakarta: PSKK UGM, 1998. hlm. 61-66.

Sejak tanggal 30 Januari 2011, pesantren waria telah tercatat sebagai sebuah institusi agama resmi dengan struktur organisasi yang rapi. Seperti dewan syuro sebagai penasihat utama dan dewan tanfidziyah sebagai penyelenggara aktivitas sehari-hari di pesantren. Ketua pesantren adalah Mariani dan wakil ketua adalah Sinta Ratri, sekretaris dipegang oleh Yuni dan bagian bendahara dipegang oleh Ruly. Semua orang-orang dalam struktur organisasi adalah waria kecuali pengajar.¹⁴

Pasca Mariani meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014, maka lokasi pondok pesantren waria pindah lokasi ke kediaman Sinta Ratri di Celenan RT.09 RW.02 Jagalan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Sinta Ratri, nama pondok pesantren waria senin-kamis berubah menjadi pondok pesantren waria Al-Fattah. Tujuan perubahan nama adalah agar aktivitas pesantren tidak hanya terpaku pada hari senin dan kamis.¹⁵

Di era ini pembimbing pesantren adalah ustadz Zakaria. Pondok pesantren waria kemudian memiliki visi dan misi. Visinya adalah untuk mewujudkan kehidupan waria yang bertakwa kepada Allah SWT, dan bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga serta komunitas, masyarakat dan negara. Kemudian misinya adalah untuk mendidik para santri waria menjadi pribadi yang bertakwa dengan berbekal ilmu agama Islam yang kuat dan mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan segala lapisan komponen masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.¹⁶

Berdasarkan pengamatan penulis, sumber ekonomi pesantren waria didapat secara mandiri dan solidaritas antar waria. Ditambah kumpulan uang infak bagi para tamu yang datang berkunjung untuk liputan, wawancara, penelitian maupun kerjasama. Kekuatan ekonomi pesantren tidak terlepas pengaruhnya dari pimpinan pesantren, yang mana jika dulu Mariani adalah *owner* salon "Arini", maka pimpinan yang sekarang adalah pengusaha pengrajin perak di Kotagede dengan brand "Ratri Silver". Kemampuan ekonomi kedua pimpinan pesantren sangat berpengaruh terhadap kekuatan ekonomi pesantren.

Kekuatan ekonomi masing-masing pimpinan pesantren waria menjadi ukuran standar kemandirian pesantren. Mengutip pandangan Nurcholish Madjid bahwa pada dasarnya semangat pesantren adalah pancaran kepribadian pendirinya. Karenanya muncul persepsi bahwa hampir semua pesantren yang berdiri merupakan hasil usaha pribadi atau

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁵ Lihat Arif Nuh Safri, *Penerimaan Keluarga Terhadap Waria/Transgender (Studi Kasus atas Waria/transgender di Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta)*, dalam Jurnal Nizham "Islam dan LGBT" Vol. 05 No. 01 Januari-Juni 2016 STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, hlm. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

individu pendirinya.¹⁷ Ketokohan pimpinan pesantren baik itu Kyai atau Nyai, merupakan modalitas utama dalam dunia pesantren, termasuk dalam hal ini adalah pesantren waria.

Sejak tahun 2016 penulis menjadi tenaga pengajar di pesantren waria. Penulis melihat ada kebebasan dalam memilih atribut yang akan digunakan untuk menunaikan sholat. Pesantren waria telah menyediakan mukena, sarung dan kopyah. Para santri waria memiliki hak untuk memilih apakah menggunakan mukena atau kopyah. Hasil pengamatan penulis, lebih banyak waria yang menggunakan kopyah ketimbang mukena ketika melaksanakan sholat berjama'ah.

Kebebasan memilih menggunakan atribut sholat tersebut berdasarkan pada "kenyamanan" para masing-masing waria. Pihak pesantren baik tenaga pengajar maupun pimpinan tidak pernah mengintervensi kebebasan tersebut. Ketika pelaksanaan sholat, imam adalah seorang laki-laki yaitu ustadz dan makmum berada di belakang imam. Makmum yang menggunakan kopyah dan sarung berada di shof pertama, sedangkan makmum yang menggunakan mukena berada di shaf belakang.

Kini di tahun 2019, santri pondok pesantren berjumlah 48 orang dengan santri aktif datang sekitar 25 hingga 35 santri. Santri datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal di pesantren sebagian lagi tinggal di kos-kosan sekitar area pondok pesantren. Sedangkan tenaga pengajar berjumlah 4 orang yang kesemuanya adalah alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dua orang tenaga pengajar adalah dosen, satu orang lagi mahasiswa pascasarjana dan satu orang lagi mahasiswa akhir strata satu.

B. Pondok Pesantren dan Resolusi Konflik

Hal yang membedakan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah kyai, masjid atau musholla, santri dan kitab kuning klasik. Tanpa elemen tersebut sebuah lembaga pendidikan Islam tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pondok pesantren. Dalam hal kategori pondok pesantren, pondok pesantren memiliki dua kategori yaitu; pesantren salaf dan pesantren modern. Pesantren salaf (tradisional) mencerminkan kesederhanaan hidup bagi diri santri dan tempat tinggal santri. Sedangkan pesantren mencerminkan suatu hal yang modern dalam sistem dan bangunan fisik tempat tinggal santri.

Proses pembelajaran di pesantren terdiri dari dua sistem, yakni *sorogan* dan *bandongan*. sistem *sorogan* bisa dilihat dimana antara kyai atau ustadz dan santri saling

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta:Paramadina, 1997. hlm. 06.

berhadapan (*face to face*). Sedangkan sistem *bandongan* adalah belajar bersama dimana sekelompok murid mendengarkan seorang kyai atau ustadz yang sedang membaca, menerjemahkan, menerangkan berbagai buku Islam (kitab kuning). Biasanya sistem *bandongan* ini disebut dengan *halaqah* yaitu sekelompok santri belajar di bawah bimbingan seorang guru.¹⁸

Pada umumnya pembagian keahlian para lulusan atau alumni atau produk pendidikan pesantren berkisar pada bidang-bidang antara lain: nahwu sharaf (gramatika Bahasa Arab), fiqh (sekumpulan hukum amaliah), aqa'id (keyakinan), tasawuf, tafsir, hadis dan Bahasa Arab.¹⁹ Bahan ajar di pesantren tradisional di dominasi dari sumber kitab kuning. Kitab kuning menjadi rujukan utama bahan ajar guru-guru (kyai, nyai, ustadzah dan ustadz) di pondok pesantren. Kitab-kitab tersebut dikarang atau ditulis oleh seorang laki-laki dan tidak terdapat pengarang perempuan.²⁰

Sebagai institusi pendidikan yang bercorak keagamaan, pesantren mengemban tanggung jawab moral agama, posisi yang demikian sudah lumrah di masyarakat. Karenanya masyarakat melihat konflik dalam pesantren sebagai suatu hal yang harus segera diselesaikan. Konflik di pesantren terbagi menjadi beberapa hal. *Pertama*, konflik keluarga. *Kedua*, konflik politik yang merupakan penyebab dominan dan berdampak terhadap eksistensi pesantren. *Ketiga*, perebutan pengaruh dimata umat yang berkaitan dengan eksistensi seorang kyai. *Keempat*, feodalisme di pesantren antara kyai dan santri. *Kelima*, konflik manajemen yang berkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengembangan pesantren.²¹

Dalam proses penyelesaian konflik, pesantren menggunakan beberapa model resolusi konflik yang lumrah digunakan di lingkungan pesantren.²² Model tersebut antara lain *pertama*, yudikasi yaitu proses penyelesaian konflik secara hukum karena alasan status kepemilikan pesantren baik berkaitan dengan lahan di atasnya, legalisasi melalui jalur hukum ditempuh melalui sertifikasi tanah atau lahan bangunan pesantren lewat akte notaris dan pengadilan. *Kedua*, arbitrase yaitu kehadiran pihak ketiga yang dimintakan bantuan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik, pihak ketiga yang menjadi arbiter berhak untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak.

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, 1985, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta. hlm. 97.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*....hlm. 07-12.

²⁰ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren & Tarekat*, Terj. Farid Wajidi & Rika Iffati, Yogyakarta:Gading Publishing,2012. hlm. 211.

²¹ Hamdan Farchan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005. hlm. 89.

²² Hamdan Farchan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren*.....hlm. 197-223.

Ketiga, mediasi yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral dalam proses penyelesaian konflik, mediator disini tidak berhak mengambil keputusan. *Keempat*, negosiasi atau *tabayun* yaitu proses mengatasi masalah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, dilakukan secara sukarela untuk mencapai sebuah kompromi yang diterima oleh masing-masing pihak yang berkonflik. *Kelima*, rekonsiliasi atau *islah* (damai) yaitu tujuan akhir dari semua upaya resolusi konflik dengan cara rujuk dan pemulihan hubungan yang retak antara pihak-pihak yang berkonflik menjadi hubungan koeksistensi damai, hidup berdampingan tidak saling mengganggu satu sama lain dan kerjasama sosial satu sama lain.

C. Strategi Resolusi Konflik Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Shinta Ratri²³ (pemimpin pesantren waria ketika tahun 2016 sampai sekarang) bahwa konflik yang terjadi di pesantren waria adalah dampak dari menyebarnya isu LGBT di awal tahun 2016. Konflik bermula ketika salah satu media online Panjimas.com berkunjung ke pesantren waria di Kotagede. Pihak media menanyakan tentang agenda besar pesantren waria di tahun ini, kemudian ibu Sinta menjawab bahwa pesantren sedang melakukan kerjasama yang ditawarkan oleh dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga untuk menyusun Fiqih Marjinal bagi kelompok miskin, difabel, perempuan dan waria.

Informasi dari ibu Sinta ini kemudian di publish oleh media Panjimas.com dengan judul berita "Pesantren waria akan menyusun fiqih waria".²⁴ Berita tersebut menuai reaksi keras dari beberapa pihak terutama dari Front Jihad Islam (FJI) wilayah Yogyakarta. Pihak pesantren waria kaget karena telah terjadi kebohongan publik atau informasi yang dipelintir. Pasca pemberitaan di media tersebut, ibu Shinta menerima informasi di Whatsapp bahwa FJI Yogyakarta akan melakukan penutupan paksa terhadap pesantren waria.

Pihak pesantren waria kemudian melapor isi whatsapp tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Banguntapan Bantul, tetapi ibu Shinta tidak menerima surat tanda laporan dalam artian laporan tersebut dianggap tidak ada. Maka pada hari jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekelompok orang dari FJI dibantu oleh Polsek kecamatan Banguntapan Bantul menutup pesantren waria. Aksi penutupan tersebut menurut ibu Shinta merupakan bentuk pembiaran dari pihak kepolisian yang seharusnya mengamankan warganya.

²³ Wawancara dilakukan di kediaman ibu Sinta di Kotagede Yogyakarta, 03 September 2019 pukul 15.30-17.00 WIB.

²⁴ Lihat berita ini di <https://www.panjimas.com/news/2016/02/04/lgbt-merajalela-pesantren-waria-akan-susun-kitab-fiqih-waria/>

Pasca penutupan paksa tersebut, kegiatan pondok pesantren ditutup oleh ibu Shinta selama kurang lebih 4 bulan dari bulan Februari hingga bulan Juni 2016. Beberapa hari setelah penutupan, pondok pesantren waria diundang oleh pihak kelurahan Jagalan dengan catatan tidak membawa orang luar. Perwakilan dari pesantren waria yang hadir adalah ibu Sinta, bunda Rully, ustadz Arif dan staf dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya. Disisi yang lain pihak kelurahan Jagalan menekan keluarga ibu Sinta agar pesantren tutup secara paksa karena alasan kegiatan keagamaan di pesantren waria adalah sebuah bentuk kesalahan.

Dalam forum bersama pihak kelurahan tersebut, pihak pesantren waria diminta untuk mendengarkan ”ceramah” dari kelompok FJI, FPI dan GPK yang menuntut secara paksa penutupan pondok pesantren waria. Tetapi disisi yang lain, pihak dari pesantren waria tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau menanggapi atau memberikan komentar. Padahal jika mengikuti pendapat Kahn bahwa komunikasi yang baik akan bisa cukup memadai untuk penyelesaian konflik.²⁵Tetapi pada konteks kasus di pesantren waria tidak terjadi komunikasi yang baik antar pihak yang berkonflik.

Pasca penutupan tersebut yaitu pada tanggal 5 Maret 2016, komunitas waria di pondok pesantren waria Al-Fattah diundang oleh Walikota Yogyakarta. Karena trauma yang berat, hanya Rully yang hadir ke undangan tersebut. Menurut penuturan Rully, Rully dikawal oleh anggota Front Jihad Islam (FJI), Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) mulai dari parkir hingga pintu masuk ruang sidang dengan mata beringas dan teriakan *Allahu Akbar* dan teriakan ”Bunuh setan ini” padahal di luar terdapat barisan polisi.²⁶ Dalam forum tersebut, Rully dipersilahkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan terkait kasus penyerangan di pesantren waria. Menurut Rully, dominasi kelompok intoleran melampaui kewenangan pihak kepolisian yang seharusnya mengamankan warga negara Indonesia tanpa memandang identitas gender.

Teriakan Nama Tuhan ”*Allahu Akbar*” dengan mata beringas, pedang di tangan dan kain sorban di leher sebagai atribut yang digunakan oleh kelompok intoleran dalam kasus penutupan pesantren waria menunjukkan jika penggunaan jargon Tuhan menjadi senjata untuk menindas kelompok marginal. Menurut Lewy bahwa penggunaan atas nama Tuhan dalam sebuah konflik agama adalah demi terjaminnya kelangsungan hidup agama ataupun

²⁵ Ahmad Nur Fuad, *Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik*, dalam “Resolusi Konflik Islam Indonesia”, Yogyakarta:LKiS, 2007. hlm. 47.

²⁶ Wawancara dilakukan di kediaman Bunda Rully di Kota Yogyakarta, 05 September 2019 pukul 09.00-10.00 WIB.

dengan kata manis revolusi demi tatanan masyarakat yang adil.²⁷ Menurut penulis keberlangsungan hidup agama yang dimaksud adalah agama dalam ideologi kelompok intoleran, dan bukan memperjuangkan agama sesungguhnya.

Rathchild dan Hartzell mengidentifikasi lima pre-kondisi yang mengantarkan pada keberhasilan dalam proses negosiasi dan mediasi, yaitu munculnya pihak-pihak *bargaining* yang dapat diidentifikasi, bukti adanya jalan buntu yang saling menyakiti, adanya pemimpin-pemimpin yang ditentukan untuk pencarian solusi praktis, aktor politik dari luar yang mendukung resolusi konflik dan kehadiran mediator yang aktif.²⁸ Pada konteks kasus penutupan pesantren waria, lima identifikasi pre-kondisi yang mengantarkan pada keberhasilan dalam proses negosiasi dan mediasi tidak terjadi. Hal itu karena pihak pesantren waria sebagai korban berada di posisi dipersalahkan dan pelaku kekerasan yaitu kelompok intoleran mendapat pembenaran dari pihak pemerintah yaitu kelurahan, kecamatan dan Kapolsek.

Karena tidak terjadi komunikasi yang baik, maka menurut Rully konflik penutupan pesantren waria sebenarnya ”mandul”, dalam artian konflik ini belum selesai dan potensi untuk muncul lagi di lain waktu itu besar manakala Indonesia diguncang oleh isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Potensi munculnya konflik yang serupa selaras dengan apa yang dikatakan Hobbes bahwa konflik sosial merupakan gejala intrinsik yang tidak mungkin dihindarkan dalam kehidupan manusia.²⁹

Karena konflik tidak dapat dihindarkan, maka potensi untuk terulang kembali di waktu yang lain itu sangat besar. Apalagi penggiringan isu LGBT selalu dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurut ibu Sinta, tidak ada kata penyelesaian konflik baik lisan maupun tulisan. Bahkan surat perjanjian antara pihak-pihak yang berkonflik baik dari pihak pesantren waria, aparat pemerintah di kapolsek dan kelurahan maupun dari kelompok-kelompok intoleran itu tidak ada. Padahal menurut Wolin,³⁰ perjanjian adalah perangkat untuk menyertakan amnesia sosial ke dalam fondasi masyarakat, dan jika manusia bisa melupakan, maka pengampunan itu menjadi mungkin, memungkinkan masyarakat untuk memulai dari awal tanpa kebencian yang diwarisi.

²⁷ G. Lewy, *Religion and Revolution*, New York: Oxford University, 1974. hlm. 3-10.

²⁸ Dikutip dari Ahmad Nur Fuad, *Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik*, dalam “Resolusi Konflik Islam Indonesia”, Yogyakarta: LKiS, 2007. hlm. 47.

²⁹ Dikutip dari I Marsana Windu, *Kekuatan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992. hlm. 62.

³⁰ Dikutip dari Alexander Keller Hirsch, *Rekonsiliasi Temporal*, dalam “Teorisasi Rekonsiliasi Pasca-Konflik: Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan”, E Setiyawati dan Rahmat Fajar (Terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 178.

Karena tidak ada mediator yang mampu menyelesaikan konflik dan tidak ditemukan rekonsiliasi. Maka pihak pesantren waria melakukan beberapa strategi resolusi konflik. Strategi ini penulis dapat dengan cara wawancara mendalam dengan responden, penulis menemukan beberapa strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak pesantren waria. *Pertama*, saling melakukan koordinasi dengan lembaga jaringan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Jogja dan Komnas Perempuan. *Kedua*, menyimpan dokumen-dokumen penting pesantren dan mengevakuasi para santri untuk tinggal di rumah aman. *Ketiga*, ANBTI menjadi fasilitator mempertemukan pengurus dan santri pesantren waria dengan Kanjeng Ratu Hemas (Istri Sultan) dan mendapat jaminan keamanan secara lisan. *Keempat*, LBH menjadi inisiatif mengadakan konferensi pers antara pihak pesantren waria dengan media-media arus utama antara lain Tempo, Kompas, The Jakarta Post dan media online lainnya. *Kelima*, pihak Komnas Perempuan datang berkunjung ke pesantren waria dan meminta pengurus pesantren untuk mengirimkan laporan kekerasan. *Keenam*, Ibu Budi Wahyuni dari Komisioner Komnas Perempuan memfasilitasi pengurus pesantren waria untuk bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah di Jakarta untuk menyembuhkan trauma dan tekanan psikologis yang diderita oleh santri pesantren waria pasca kasus penutupan pesantren.

D. Manajemen Konflik di Pesantren Waria

Menurut Hamdan Farchan dan Syarifudin ketika sedang melakukan penelitian tentang konflik di pesantren-pesantren di Yogyakarta, penulis menemukan bahwa seringkali konflik dianggap tuntas setelah dilakukan upaya penyelesaian padahal upaya yang dilakukan boleh jadi baru sebatas pendekatan, penekanan dan pengelolaan bukan penyelesaian konflik. Penyelesaian secara instan tersebut dilakukan karena adanya persepsi bahwa tabu membicarakan konflik di pesantren sehingga penyelesaian konflik hanya sebatas permukaan.³¹

Dalam konteks konflik penutupan pesantren waria, konflik ini menjadi pemberitaan nasional karena diliput oleh media Tempo secara berturut-turut.³² Dalam pemberitaan di media Tempo dengan jelas dikatakan bahwa penutupan pesantren waria melanggar hak asasi manusia karena waria dilarang belajar agama dan beribadah. Mengutip pernyataan ibu Sinta ketika wawancara bahwa "belajar agama adalah hak, jika belajar agama tidak aman

³¹ Hamdan Farchan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren*.....hlm. 226.

³² Lihat di <https://nasional.tempo.co/read/752072/sujud-perih-terakhir-di-pondok-pesantren-waria-al-fattah/full&view=ok>

untuk apa kami belajar?". Karenanya menurut ibu Sinta, konflik ini belum selesai dan akan muncul lagi ketika Indonesia diguncang isu LGBT. Alasan potensi besar untuk muncul lagi karena waria merupakan kelompok LGBT yang lebih mudah dilihat oleh masyarakat secara umum.

Karena penyelesaian konflik tidak terjadi, maka manajemen konflik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, William Chang menawarkan beberapa tahapan manajemen konflik.³³ Yaitu dengan penggunaan kekuatan untuk mencegah meluasnya konflik ke tempat lain dan melibatkan banyak orang, mendorong kedua belah pihak yang bertikai mengurangi ketengangan melalui cara-cara diplomasi, penghindaran dari sikap yang bisa memicu timbulnya konflik. Disamping itu manajemen konflik juga berkaitan dengan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi harus melibatkan mereka yang terlibat langsung dalam konflik untuk menghasilkan perdamaian yang relatif terpelihara dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus pesantren waria. Manajemen konflik yang dilakukan oleh pesantren waria antara lain; *pertama*, pihak pesantren melakukan program *Security System* untuk pengurus dan santri pesantren waria, program ini diampu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya dan *Protection International*. *Kedua*, pihak pesantren mendirikan pelayanan Waria Crisis Centre (WCC) untuk akses waria ketika terjadi kondisi yang mendesak keamanan para waria, pelayanan ini kerjasama MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan lembaga-lembaga terkait seperti LBH Yogya, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jurusan Psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Jurusan Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta dan Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia.

Ketiga, pesantren waria melakukan audiensi kepada beberapa pihak terkait seperti Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY, Walikota Yogyakarta, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum dalam beribadah. *Keempat*, para waria dituntut untuk menjaga kesopanan dan norma sosial seperti ketika datang ke lokasi pesantren tidak bergerombol, tidak merokok di jalan, menggunakan pakaian yang layak secara sosial, keluar masuk pesantren di waktu-waktu yang wajar dan tidak teriak-teriak atau ketawa-ketawa di pinggir jalan. *Kelima*, bekerjasama dengan Fakultas

³³ Dikutip dari Ahmad Nur Fuad, *Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik*, dalam "Resolusi Konflik Islam Indonesia", Yogyakarta:LKiS, 2007. hlm. 49.

Budaya Universitas Gajah Mada (UGM) dalam kegiatan pementasan budaya seperti tari tradisional dan membatik. *Keenam*, menjalin komunikasi yang baik dengan KH. Muhaimin (pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat Kotagede) sebagai mediator ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan NU. Bekerjasama dengan lembaga keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah dan NU menjadi penting karena lembaga itu memiliki otoritas keagamaan untuk menekan massa yang mengatasnamakan diri sebagai pembela Tuhan.

Kesimpulan

Pondok pesantren waria merupakan pondok pesantren yang unik karena tidak ada kyai, tidak ada asrama khusus untuk santri dan santrinya adalah kumpulan komunitas muslim waria Yogyakarta. Latar belakang berdirinya pesantren waria merupakan bentuk keprihatinan karena waria juga mengalami kehausan spiritual. Pesantren waria bergerak lambat karena pemberdayaan ekonomi pesantren bersumber dari individu pribadi waria yang memiliki kemampuan finansial.

Karena keunikan itulah pesantren waria diserang oleh sekelompok orang muslim yang mengatasnamakan diri sebagai pembela Tuhan agar kegiatan pesantren ditutup dengan alasan kegiatan belajar dan beribadah di pesantren waria merupakan bentuk kesalahan dalam beragama. Waria mengalami kekerasan fisik dan verbal karena kelompok intoleran membawa senjata dengan makian dan hinaan bahwa waria adalah setan yang harus dibunuh. Disini kemudian terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena ruang ibadah untuk waria dirampas oleh kelompok intoleran.

Pesantren waria ditutup selama 4 (empat) bulan, dan kegiatan pesantren waria pasca penutupan tersebut berjalan dalam senyap dengan trauma yang tinggi dan tekanan psikologi yang dialami oleh seluruh santri. Kini pesantren waria telah bersinar dengan berbagai kegiatan yang rutin dilakukan di akhir pekan oleh seluruh komunitas muslim waria yang mau belajar agama. Santri aktif berjumlah 25 orang dari total santri 42 orang waria.

Referensi

- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren & Tarekat*, Terj. Farid Wajidi & Rika Iffati, Yogyakarta:Gading Publishing,2012.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Yogyakarta: LP3ES, 1985.

- Fuad, Ahmad Nur. *Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik*, dalam “Resolusi Konflik Islam Indonesia”, Yogyakarta:LKiS, 2007.
- Hirsch, Alexander Keller. *Rekonsiliasi Temporal*, dalam “Teorisasi Rekonsiliasi Pasca-Konflik: Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan”, E Setiyawati dan Rahmat Fajar (Terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Koeswinarno. *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, Yogyakarta: PSKK UGM, 1998.
- Lewy, G. *Religion and Revolution*, New York: Oxford University, 1974.
- Madasari, Okky. (edit.), *Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria*, Jakarta: Rehal Pustaka, 2014.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta:Paramadina, 1997.
- Safri, Arif Nuh. *Penerimaan Keluarga Terhadap Waria/Transgender (Studi Kasus atas Waria/transgender di Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta)*, dalam Jurnal Nizham “Islam dan LGBT” Vol. 05 No. 01 Januari-Juni 2016 STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Safitri, Dian Maya. *Menengok Indahnya Islamicate Indonesia Dari Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis Yogyakarta*, Prosiding Makalah AICIS 2011 di Bangka Belitung.
- Syarifudin, Hamdan Farchan. *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Windu, I Marsana. *Kekuatan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.